

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan di Indonesia hingga kini masih merupakan tantangan signifikan yang selalu dihadapi oleh bangsa dari masa ke masa. Problematika kemiskinan di Indonesia belum juga menemukan jalan keluar atau solusi yang efektif untuk mengatasi isu tersebut. Kemiskinan sering memicu munculnya kesenjangan sosial dan rasa ketidakadilan, terutama bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan. Banyak di antara mereka yang kesulitan memperoleh layanan pendidikan yang layak maupun akses kesehatan yang memadai (Forkonuddin & Lubis, 2024). Kondisi ini umumnya semakin terasa di wilayah pedalaman atau daerah-daerah yang terisolasi, yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan sehingga pembangunan dan fasilitas publik kurang tersentuh.



Gambar 1. 1 Penduduk Miskin Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2012-2021 (Data Diolah)

Dari grafik tersebut, kondisi kemiskinan di Indonesia sepanjang 2012–2021 tampak jelas bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan serius dan berkepanjangan di Indonesia. Meskipun terjadi penurunan dalam periode 2012–2019, jumlah penduduk miskin masih berada pada angka yang cukup besar, yaitu lebih dari 25 juta jiwa setiap tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa jutaan masyarakat masih hidup dalam keterbatasan, mulai dari akses terhadap kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga kebutuhan dasar sehari-hari. Penurunan yang terjadi sebelum tahun 2019 belum cukup kuat untuk membawa perubahan dan memastikan masyarakat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Situasi semakin menunjukkan bagaimana masyarakat menjadi lemah saat menghadapi wabah COVID-19. Antara tahun 2020 hingga 2021, jumlah individu yang hidup dalam kemiskinan meningkat semula kerana tekanan ekonomi yang mungkin disebabkan oleh pandemik COVID-19. Kenaikan ini menegaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan masih menghadapi tantangan besar, mulai dari ketidakstabilan ekonomi, sedikitnya jaminan sosial, hingga ketimpangan akses antarwilayah. Kondisi seperti ini kemiskinan tidak hanya terlihat sebagai angka statistik, tetapi sebagai masalah nyata yang berdampak pada kehidupan jutaan orang, menuntut kebijakan yang lebih inklusif, adaptif, dan berpihak pada kelompok rentan.

Kemiskinan bukan hanya mengenai data statistik atau angka dalam laporan maupun publikasi. Selalu ada persoalan keadilan, keterbukaan informasi, dan pemerataan kesempatan hidup yang seharusnya dapat diakses oleh setiap warga. Sebagian masyarakat masih relatif tertinggal dalam akses pendidikan, kesehatan, maupun kegiatan ekonomi, proses pembangunan tidak berjalan secara menyeluruh dan merata.

Kondisi ekonomi yang berbeda antar daerah di Indonesia dan menjadi indikator utama untuk melihat sejauh mana pemerataan pembangunan khususnya ekonomi berlangsung. Tingginya tingkat ketimpangan ini umumnya dipengaruhi oleh perbedaan potensi ekonomi di tiap daerah, baik dari perspektif kekayaan alam maupun mutu dari sumber daya manusia yang dimilikinya sehingga berperan besar dalam mendorong aktivitas perekonomian di wilayah tersebut. Ketimpangan antar wilayah dalam suatu negara sering terjadi karena adanya perbedaan kondisi geografis, besaran alokasi atau anggaran dana, ketersediaan kekayaan alam, kualitas manusia, serta tingkat fasilitas yang tersedia pada daerah masing - masing (Abidin & Amiruddin, 2020).

Salah satu isu utama dalam proses pembangunan ekonomi di banyak wilayah hingga saat ini merupakan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan menggambarkan variasi dalam taraf kesejahteraan dan pendapatan di antara berbagai kelompok masyarakat. (Subrata, 2018). Apabila tidak diperhatikan sebagai indikator penting dalam upaya mewujudkan pembangunan yang merata, ketimpangan ini dapat memicu ketidakstabilan ekonomi dan memperburuk angka kemiskinan. Untuk mengukur seberapa tinggi ketimpangan yang ada, kita bisa memanfaatkan indikator seperti pendapatan setiap individu dan total populasi di setiap daerah.

Salah satu alat ukur ketimpangan pendapatan yang paling populer digunakan oleh peneliti saat ini adalah indeks gini. Ukuran ini dianggap efektif karena mampu menggambarkan secara sensitif hubungan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dengan kelompok penduduk lainnya, sehingga ketimpangan pendapatan dapat terlihat dengan jelas (Syamsudin, 2011). Indeks gini menunjukkan seberapa besar kesenjangan dalam distribusi pendapatan.



Gambar 1. 2 Indeks Gini Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2012-2021 (Data Diolah)

Pada gambar 1.2 indeks gini Indonesia di atas menunjukkan bagaimana tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia berjalan dari tahun 2012 hingga 2021. Pada awal periode 2012–2014, indeks gini berada pada tingkat relatif 0,41 yang menandakan tingkat ketimpangan sedang atau distribusi pendapatan tidak merata sepenuhnya (jauh dari nol) dan tidak begitu parah. Angka ini menggambarkan kenyataan bahwa distribusi pendapatan belum merata masyarakat dengan pendapatan tinggi masih jauh lebih sejahtera dibandingkan kelompok berpendapatan rendah. Tahun 2015, indeks gini perlahan menurun hingga mencapai pada angka 0,38 di tahun 2018, artinya ketimpangan dianggap rendah atau distribusi pendapatan mulai merata sepenuhnya. Angka ini menggambarkan kenyataan bahwa distribusi pendapatan telah merata, dan pengeluaran masyarakat sudah semakin membaik. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pemerataan pendapatan dan pengeluaran. Semakin rendah angka Indeks Gini, maka keadaan ekonomi akan semakin membaik karena perbedaan pendapatan berkurang, yang menunjukkan bahwa pembagian pendapatan menjadi lebih seimbang sehingga hasil

dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh lebih banyak orang. (Adib et al., 2019).

Tren penurunan terjadi pada tahun 2018 sehingga tidak berkelanjutan secara konstan. Indeks pada tahun 2019 dan 2020 meningkat semula kepada 0,39 sebelum jatuh kembali kepada 0,38 pada tahun 2021. Fluktuasi ini menandakan bahwa upaya pemerataan ekonomi masih belum kokoh dan mudah terpengaruh kondisi sosial maupun ekonomi, termasuk pandemic COVID-19. Realitas semua angka dari grafik tersebut memberikan informasi bahwa ketimpangan masih menjadi masalah serius yang perlu diselesaikan. Pemerataan akses pendidikan, kesempatan kerja, kualitas layanan publik, dan perkembangan ekonomi antarwilayah masih menjadi proyek besar. Ketidakmerataan yang terus terjadi dapat memicu gangguan terhadap stabilitas sosial dan berisiko menghambat keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang (Efendi, 2025).

Indonesia memerlukan tidak hanya kemajuan ekonomi, tetapi juga distribusi keadilan ekonomi supaya peningkatan taraf hidup dapat dirasakan oleh semua kalangan, bukan hanya segelintir kelompok. Prinsip keadilan menjadi fondasi utama karena menyangkut seluruh masyarakat. Ketika distribusi tidak merata dan hanya menguntungkan kelompok tertentu, ketidakadilan ekonomi muncul dan berujung pada ketimpangan kesejahteraan sehingga persoalan semakin mengarah pada meningkatnya ketimpangan pendapatan (Tambunan, 2006). Kondisi ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan melemahkan hubungan masyarakat apabila tidak segera diatasi. Maka dari itu, kebijakan pembangunan perlu diarahkan pada pemerataan akses, kesempatan, dan hasil pembangunan agar pertumbuhan ekonomi benar-benar bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Pembangunan manusia sering dijadikan indikator untuk melihat seberapa maju suatu daerah (Syafriana et al., 2020). Dalam mengukur tingkat pencapaian dalam pengembangan sumber daya manusia, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPPBB) memperkenalkan suatu tolok ukur yang dinamakan Indeks Pembangunan Manusia.



Gambar 1. 3 Indeks Pembangunan Manusia

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2012-2021 (Data Diolah)

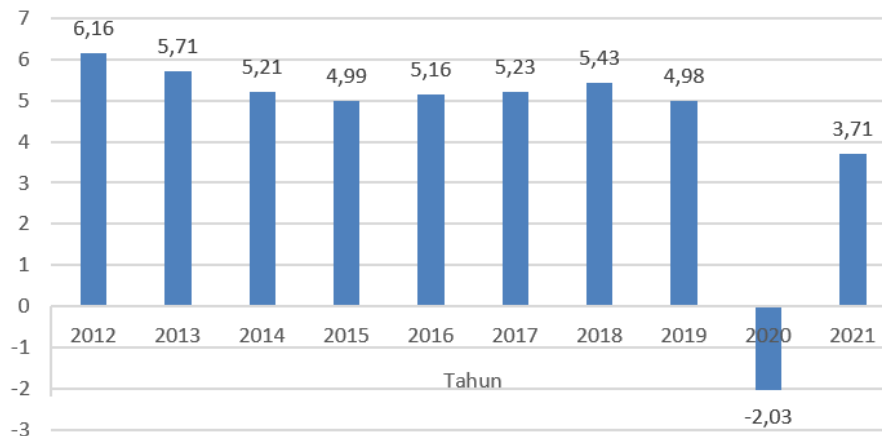
Grafik ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia telah merasakan kemajuan yang berarti antara tahun 2012 hingga 2021. Tahun 2012, nilai IPM berada di angka 67,7 dan setiap tahun mengalami peningkatan hingga mencapai pada angka 73,16 di tahun 2021. Peningkatan ini menggambarkan bahwa kualitas hidup masyarakat Indonesia secara umum semakin pulih, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, maupun standar hidup layak. Peningkatan yang berkelanjutan ini menunjukkan adanya usaha dalam pembangunan yang ramah lingkungan serta peningkatan koneksi masyarakat atas layanan utama seperti kesehatan, pendidikan, dan juga pekerjaan yang lebih efisien. Semakin banyak pengetahuan dan keahlian yang dimiliki seseorang, semakin tinggi

pula kemungkinan mereka untuk meningkatkan efisiensi kerja, yang pada akhirnya bisa berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan (Suliswanto, 2010). Peningkatan IPM ini juga menandakan bahwa pembangunan yang berfokus pada manusia tidak akan terjadi dalam sekejap dan memerlukan durasi yang lama untuk mendapatkan hasil yang berarti.

Kenaikan yang berlangsung setiap tahun berlangsung secara perlahan, menunjukkan bahwa masih ada beberapa tantangan dalam distribusi pembangunan antar kawasan serta adanya perbedaan dalam kesejahteraan sosial. Meskipun Indonesia mengalami pandemi COVID-19 pada tahun 2020–2021, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tetap menunjukkan peningkatan, meskipun pertumbuhannya mengalami perlambatan. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki ketahanan yang cukup kuat, namun tetap memerlukan dukungan kebijakan dan investasi strategis agar peningkatan pembangunan manusia dapat berlanjut lebih cepat dan merata di seluruh daerah. Pendekatan yang strategis dalam mengelola kebijakan pendidikan, pengaturan anggaran pemerintah, serta investasi, agar peningkatan IPM dapat terjadi secara signifikan dan merata di seluruh wilayah (Lukman Hakim, 2024).

Tingkat perkembangan ekonomi adalah salah satu tolok ukur krusial yang dimanfaatkan untuk mengukur kesuksesan suatu proses pembangunan. (Suliswanto, 2010). Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari jumlah nilai tambah yang diciptakan di suatu wilayah yang dijelaskan selaku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB memberikan gambaran tentang kapabilitas ekonomi suatu kawasan karena merupakan total nilai tambah dari semua unit produksi. Dengan menggunakan PDRB, kita bisa mengevaluasi hasil pertumbuhan ekonomi sekaligus memahami struktur ekonomi di wilayah tersebut.

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Gambar 1. 4 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
 Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2012-2021 (Data Diolah)

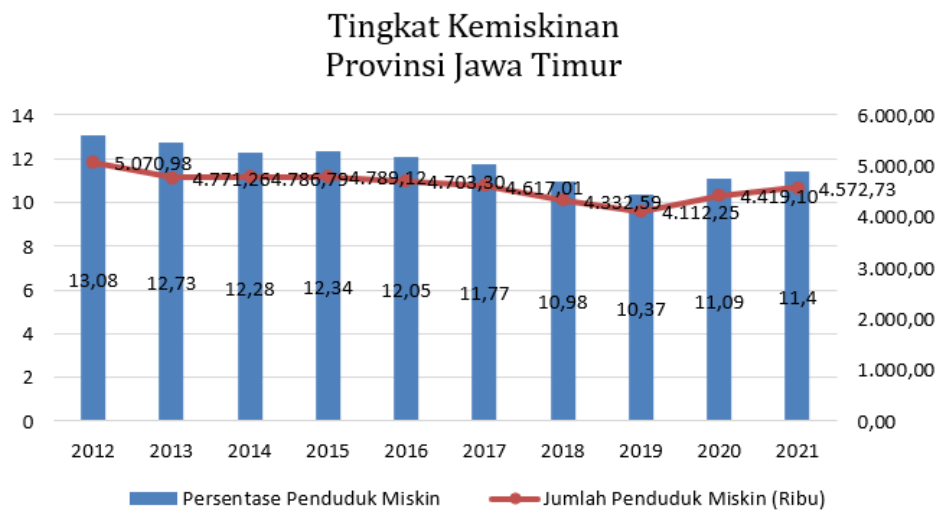
Grafik tersebut menunjukkan bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia bergerak selama tahun 2012–2021. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi berada pada posisi yang kuat, yakni 6,16%, kemudian perlahan menurun hingga berada di kisaran 4,9%–5,4% dalam rentang 2015–2019. Penurunan ini menggambarkan bahwa ekonomi Indonesia mulai kehilangan momentum, meskipun masih tumbuh positif. Kondisi berubah drastis pada tahun 2020 ketika ekonomi jatuh hingga $-2,03\%$ akibat pandemi COVID-19, mencerminkan terganggunya aktivitas ekonomi, hilangnya pekerjaan, dan terhentinya banyak sektor produktif. Pada tahun 2021 perekonomian mulai pulih, ditunjukkan dengan pertumbuhan 3,71%, meski belum kembali ke level sebelum pandemi.

Grafik itu menggambarkan adanya kaitan yang nyata antara kemajuan pertumbuhan ekonomi dengan pergeseran jumlah individu yang hidup dalam kemiskinan. Ketika tren stabil dan positif sepanjang 2012–2019, angka kemiskinan terus menurun yang menunjukkan bahwa pengaruh ekonomi mampu membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki kesejahteraan

masyarakat. Pemerintah daerah memegang peranan besar dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, karena ketika ekonomi terus bertumbuh, peluang untuk menekan angka kemiskinan semakin besar. Perkembangan ekonomi yang konsisten dapat menghasilkan lebih banyak kesempatan pekerjaan, meningkatkan penghasilan masyarakat, dan pada gilirannya berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan (Suharlina, 2020).

Ekonomi menurun pada 2020, kemiskinan meningkat kembali karena banyak masyarakat kehilangan penghasilan. Meskipun ekonomi mulai bangkit pada 2021, efek pemulihan terhadap pengurangan kemiskinan tidak dapat dirasakan secara langsung dan cepat. Pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka makro, tetapi sangat berdampak pada kehidupan manusia. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya soal angka dalam laporan statistik, terdapat berbagai faktor saling terkait yang menentukan arah dan kecepatan perkembangan ekonomi sebuah negara, antara lain kualitas SDM, ketersediaan SDA, kekuatan modal, serta tingkat inflasi (Saragih et al., 2024). Ketika ekonomi tumbuh, masyarakat lebih berpeluang keluar dari kemiskinan, namun ketika ekonomi terpuruk, kelompok rentan yang paling pertama merasakan dampaknya.

Salah satu daerah penyumbang ekonomi utama bagi Indonesia yakni Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur menjadi kontributor tertinggi kedua untuk perekonomian nasional, dengan pertumbuhan yang sejalan dengan rata-rata pertumbuhan Indonesia serta provinsi-provinsi besar Pulau Jawa (Izza et al., 2023). Masalah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur merupakan hal penting yang harus diselesaikan. Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik, Jawa Timur menduduki posisi ketiga di antara tujuh provinsi dengan tingkat kemiskinan paling tinggi di Pulau Jawa.



Gambar 1. 5 Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Timur
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2012-2021 (Data Diolah)

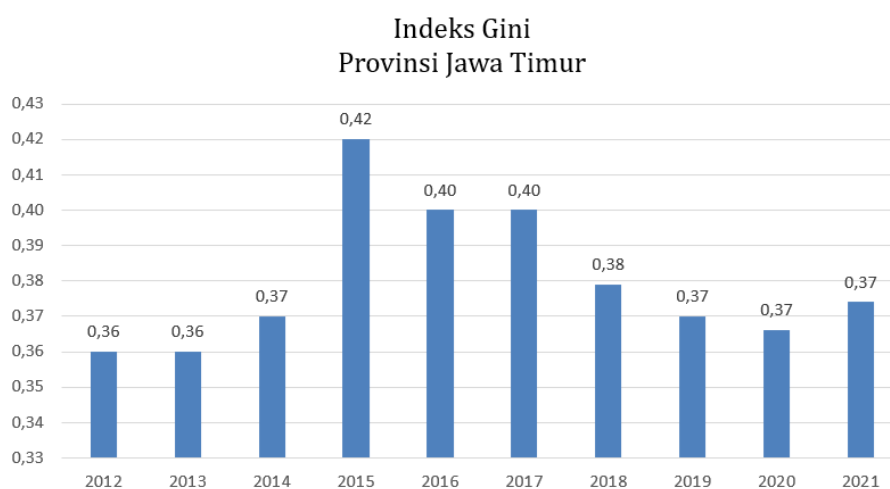
Grafik itu mengindikasikan bahwa proporsi warga yang hidup dalam kemiskinan di Provinsi Jawa Timur telah mengalami fluktuasi yang signifikan antara tahun 2012 dan 2021. Di tahun 2012, persentase individu yang tergolong miskin mencapai 13,08% dengan total sekitar 5,07 juta orang. Secara bertahap, angka tersebut terus menurun hingga berada pada titik terendah pada 2019 dengan persentase 10,37% dan jumlah sekitar 4,33 juta jiwa. Pergerakan ini menunjukkan bahwa adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat seiring meningkatnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Penurunan tersebut bukan hanya menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi, tetapi juga upaya pemerintah dalam memberikan bantuan sosial dan mendorong produktivitas masyarakat.

Perubahan besar terjadi ketika tahun 2020 saat COVID-19 melanda. Jumlah penduduk miskin naik kembali menjadi sekitar 4,11 juta jiwa dengan persentase 11,09%, sebelum sedikit membaik pada 2021 menjadi 11,40% atau sekitar 4,57 juta jiwa. Kenaikan ini menunjukkan bahwa dampak dari krisis ekonomi yang

ditimbulkan oleh wabah COVID-19 memberikan dampak besar bagi masyarakat, terutama bagi para pekerja pada sektor informal serta keluarga dengan pendapatan rendah.

Grafik ini menjelaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan merupakan proses panjang dan rapuh, ketika ekonomi berjalan baik, kemiskinan dapat ditekan, tetapi ketika terjadi guncangan, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat bawah. Hal ini menegaskan pentingnya kebijakan yang berkesinambungan, perlindungan sosial yang kuat, dan pemerataan pembangunan hingga tingkat desa agar kesejahteraan masyarakat Jawa Timur tidak mudah terguncang oleh krisis apa pun di masa depan.

Kesejahteraan masyarakat tidak dapat dinilai hanya dari jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan atau dari tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi. Salah satu aspek penting yaitu kualitas hidup masyarakat. Sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh setiap golongan. Kehidupan yang layak dan berkualitas merupakan unsur penting dalam membangun manusia yang produktif dan berdaya (Meilianna et al., 2021).



Gambar 1. 6 Indeks Gini Provinsi Jawa Timur
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2012-2021 (Data Diolah)

Grafik diatas menggambarkan bahwa disparitas pendapatan di Jawa Timur mengalami variasi yang tidak konsisten antara tahun 2012 hingga 2021. Di tahun 2012, Indeks Gini tercatat pada angka 0,36 dan cenderung stabil sampai tahun 2014. Namun pada 2015 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 0,42, menggambarkan meningkatnya kesenjangan kesejahteraan antara kelompok kaya dan miskin. Menurut (Arif & Agustin Wicaksana, 2017) Pacitan, Batu, dan Blitar menempati posisi sebagai daerah dengan tingkat ketimpangan paling tinggi di Jawa Timur, dengan nilai Indeks Gini yang mencapai 0,40. Ketimpangan perlahan menurun bahkan mencapai titik terendah pada 2018 dan 2019 dengan nilai 0,38 dan 0,37. Meski tren ketimpangan cenderung membaik setelah 2015, grafik menunjukkan bahwa pada 2021 nilai indeks gini sedikit meningkat menjadi 0,37, menandakan bahwa pemerataan ekonomi masih menjadi proyek besar yang belum tuntas.

Pada periode ketika kemiskinan menurun, seperti 2012–2019, Indeks Gini juga ikut membaik, menandakan bahwa saat pendapatan masyarakat meningkat secara lebih merata, kesejahteraan semakin terasa oleh semua lapisan. Ketika pandemi COVID-19 terjadi pada 2020–2021, meskipun angka kemiskinan naik, ketimpangan pendapatan tidak kembali melonjak drastis tetapi tetap berada di kisaran moderat. Banyak rumah tangga dari kelompok ekonomi bawah dan menengah sama-sama terkena dampak (Hafid, 2020). Peningkatan indeks gini pada 2021 menjadi pengingat bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur ke depan tidak boleh hanya fokus menurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga harus memastikan pemerataan pendapatan agar kesejahteraan mampu dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil tanpa terkecuali.

Pembangunan sumber daya manusia di daerah Jawa Timur menunjukkan perkembangan positif. Tiap tahun, terdapat peningkatan yang stabil dan menggembirakan. Menurut informasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Indeks Pembangunan Manusia di area ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, bahkan peringkatnya dalam kompetisi antarprovinsi juga menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan.



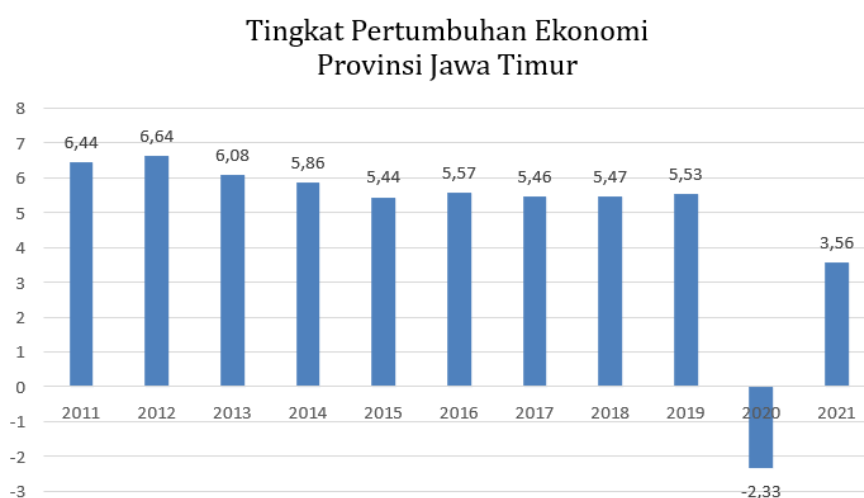
Gambar 1. 7 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2012-2021 (Data Diolah)

Grafik tersebut menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Wilayah Jawa Timur mengalami kenaikan yang stabil dari tahun 2012 hingga 2021. Pada tahun 2012, angka IPM tercatat sebesar 66,74 dan terus meningkat secara bertahap setiap tahunnya, sampai akhirnya mencapai 72,14 di tahun 2021. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Jawa Timur semakin membaik, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun standar kelayakan hidup. Perbaikan ini mencerminkan adanya peningkatan akses terhadap layanan dasar pemerintah, bertambahnya peluang pendidikan, serta meningkatnya produktivitas masyarakat dalam menghasilkan pendapatan. Peningkatan IPM tersebut menandakan bahwa pembangunan manusia di Jawa Timur bukan sekadar bersifat

formalitas, tetapi menyentuh kebutuhan fundamental manusia agar dapat hidup layak dan berkembang.

Tren kenaikan IPM sejalan dengan penurunan angka kemiskinan hingga tahun 2019. Ketika kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat meningkat, persentase penduduk miskin dapat ditekan hingga mencapai tingkat terendah selama periode tersebut. Namun, pandemi COVID-19 pada 2020 – 2021 membawa tantangan baru, angka kemiskinan kembali naik meskipun IPM tetap bertumbuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa guncangan ekonomi dan sosial dapat dengan cepat menghancurkan daya tahan kelompok rentan, meskipun capaian pembangunan manusia secara agregat terus membaik. Situasi tersebut menegaskan pentingnya kebijakan perlindungan sosial dan ketahanan ekonomi agar peningkatan IPM mampu benar-benar melindungi masyarakat dari krisis.



Gambar 1. 8 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2012-2021 (Data Diolah)

Grafik ini memperlihatkan bagaimana laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur bervariasi sepanjang tahun 2012 hingga 2021. Pada periode 2012–2019, pertumbuhan ekonomi bergerak stabil di kisaran 5–6%, menandakan aktivitas ekonomi yang cukup kuat dan produktif. Pada tahun 2020 terjadi penurunan tajam

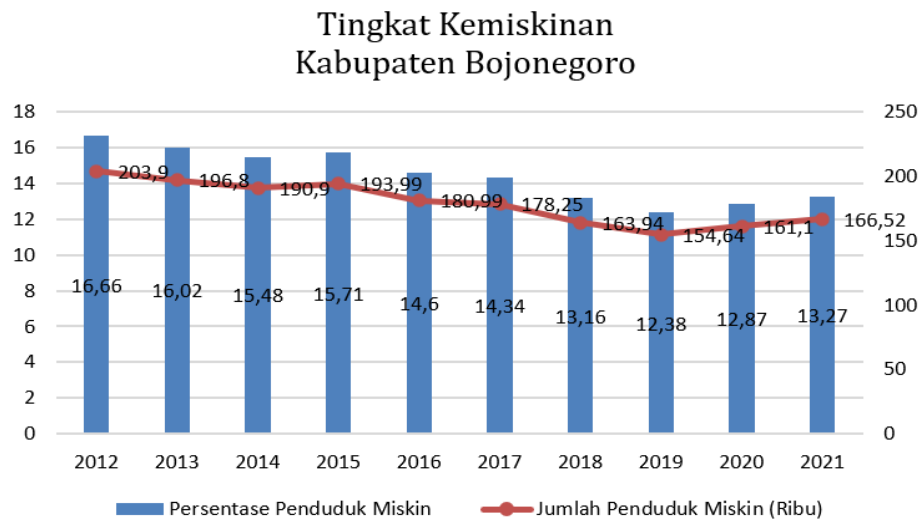
hingga -2,33%, yang merupakan kontraksi ekonomi dampak virus COVID-19 yang menghentikan berbagai sektor usaha, lapangan kerja, serta kegiatan perdagangan dan industri. Pada tahun 2021, ekonomi Jawa Timur mulai bangkit kembali dengan pertumbuhan 3,56%, meskipun belum sepenuhnya pulih seperti kondisi sebelum pandemi.

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur sekadar angka statistik, tetapi cerminan dari bagaimana aktivitas masyarakat, produktivitas wilayah, dan roda perekonomian bergerak dari waktu ke waktu. Dengan menelaah perkembangan ini secara lebih dekat, kita dapat melihat seberapa jauh Jawa Timur mampu mendorong kesejahteraan masyarakatnya serta menghadapi tantangan ekonomi yang terus berubah.

Pertumbuhan ekonomi memiliki peran besar dalam menentukan kesejahteraan masyarakat. Pada saat ekonomi tumbuh stabil tahun 2012–2019, angka kemiskinan di Jawa Timur terus menurun karena tersedianya peluang kerja, pendapatan cukup, dan berkembangnya aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Ketika ekonomi jatuh pada 2020, kemiskinan kembali meningkat karena banyak keluarga kehilangan mata pencaharian dan pendapatannya. Meski ekonomi mulai pulih pada 2021, penurunan kemiskinan tidak terjadi secepat pemulihan ekonomi, menunjukkan bahwa masyarakat berpendapatan rendah membutuhkan waktu lebih lama untuk bangkit dibandingkan indikator ekonomi makro.

Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban merupakan daerah berada di barat laut Provinsi Jawa Timur. Kedua daerah tersebut mempunyai perbedaan dalam segi ekonomi, geografi dan pariwisata. Perbedaan karakteristik tersebut dapat memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk tingkat kemiskinan yang dihadapi di masing-masing daerah. Masalah kemiskinan masih

menjadi tantangan pembangunan karena tidak semua lapisan masyarakat mampu merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi dan potensi daerah secara merata.



Gambar 1. 9 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2012-2021 (Data Diolah)



Gambar 1. 10 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tuban
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2012-2021 (Data Diolah)

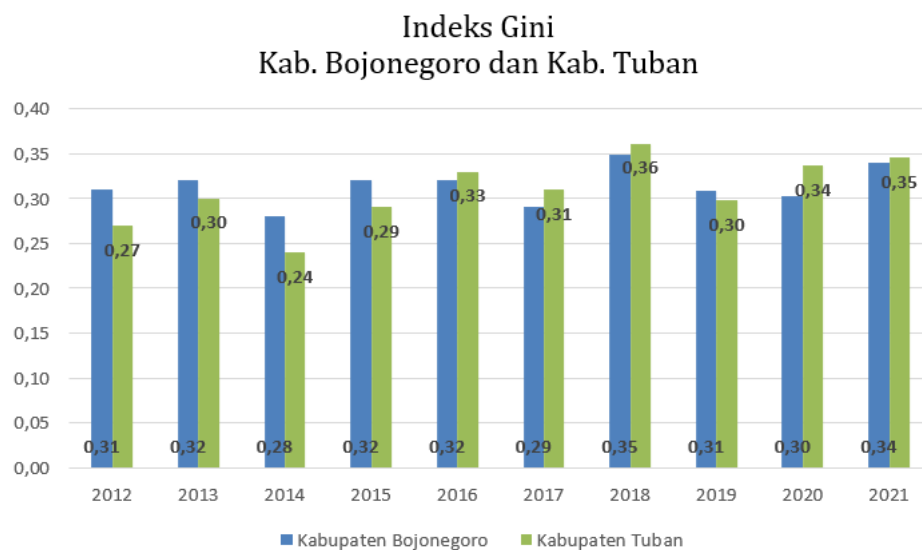
Selama hampir satu dekade pemerintah Kabupaten Bojonegoro berupaya menekan jumlah penduduk miskin. Persentase penduduk miskin turun cukup stabil dari 16,66% pada 2012 menjadi 13,27% pada 2021. Jumlah penduduk miskin secara tidak langsung juga mengikuti pola penurunan, dari sekitar 203,9 ribu orang

pada tahun 2012 berkurang menjadi 166,52 ribu jiwa pada tahun 2021. Meskipun pada tahun 2020 terjadi sedikit peningkatan akibat tekanan ekonomi dari pandemi COVID-19, secara umum tren yang terlihat menunjukkan arah yang positif, di mana tingkat kemiskinan terus menurun meskipun belum sepenuhnya teratasi.

Sementara Kabupaten Tuban menunjukkan dinamika yang lebih berfluktuatif. Persentase penduduk miskin turun dari 17,84% pada 2012 menjadi 16,31% pada 2021, namun tidak menurun secepat grafik Bojonegoro. Momen penurunan tajam pada 2018–2019 hingga menyentuh 14,58%, disertai turunnya jumlah penduduk miskin menjadi 170,8 ribu jiwa. Pada 2020 dan 2021, kemiskinan kembali meningkat, menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah ini belum cukup kuat menghadapi guncangan eksternal yaitu COVID-19. Penurunan tetap terjadi tetapi dengan pola naik–turun yang lebih tajam.

Jika dibandingkan, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban sama-sama berhasil menekan angka kemiskinan, tetapi Bojonegoro menunjukkan tren penurunan yang lebih konsisten dan stabil, sementara Tuban mengalami fluktuasi lebih besar dari tahun ke tahun. Kedua daerah sama-sama terlihat terpengaruh pandemi pada 2020, namun Bojonegoro lebih cepat memulihkannya dibanding Tuban. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan kemiskinan tidak selalu ditentukan oleh besarnya penurunan angka, tetapi juga oleh stabilitas ekonomi, ketahanan masyarakat, dan keberlanjutan program bantuan sosial. Kedua daerah masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk memastikan kemajuan ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya sebagian kalangan. Masih terdapat masyarakat yang rentan jatuh kembali ke dalam kemiskinan akibat keterbatasan akses pekerjaan dan ketimpangan pendapatan. Ketidakseimbangan dalam memperoleh pelatihan, akses layanan kesehatan, dan prospek ekonomi juga

menjadi elemen yang menghambat usaha dalam mengurangi kemiskinan.



Gambar 1. 11 Indeks Gini Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Probolinggo, 2012-2021 (Data Diolah)

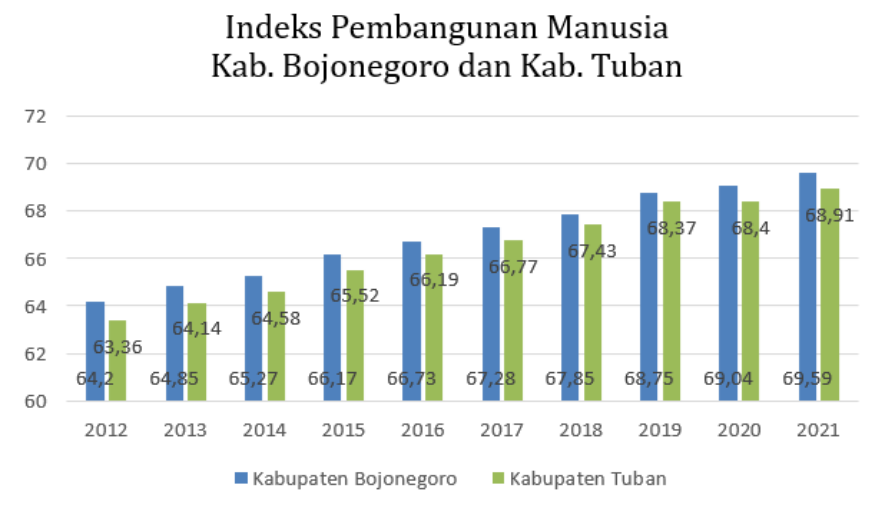
Melihat grafik indeks gini di Kabupaten Bojonegoro, terlihat bahwa ketimpangan pendapatan di wilayah ini mengalami dinamika yang cukup bervariasi sepanjang periode 2012–2021. Nilai indeks gini berada di rentang 0,31 – 0,34, yang menunjukkan tingkat ketimpangan masih tergolong sedang. Kenaikan paling signifikan terjadi pada 2018, ketika indeks gini mencapai titik tertinggi 0,35, menggambarkan bahwa kesenjangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah semakin besar di tahun tersebut. Meskipun sempat menurun lagi di 2019 0,31 dan 2020 0,30, ketimpangan kembali naik pada 2021. Ini mengindikasikan bahwa manfaat dari perkembangan ekonomi yang sedang berlangsung belum sepenuhnya dialami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kabupaten Tuban memperlihatkan pola ketimpangan yang sedikit berbeda dari Kabupaten Bojonegoro. Mulai tahun 2012, indeks gini sudah berada pada angka yang lebih rendah dibanding Kabupaten Bojonegoro yakni 0,27, dalam jangka panjang kecenderungannya justru meningkat hingga mencapai 0,35 pada

2021. Lonjakan terjadi pada 2018, ketika indeks gini menyentuh 0,36, menjadikannya titik ketimpangan tertinggi dalam satu periode. Meskipun sempat turun pada 2019 di angka 0,30, angka ini kembali naik pada 2020 dan 2021 yakni 0,34 – 0,35, menggambarkan bahwa kesenjangan ekonomi di Tuban berkembang semakin tinggi. Fenomena ini memberi sinyal bahwa sebagian kelompok masyarakat mendapat manfaat ekonomi jauh lebih besar dibanding kelompok lainnya.

Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban sama-sama menunjukkan peningkatan ketimpangan pendapatan sepanjang 2012–2021, namun pola dan levelnya berbeda. Kabupaten Bojonegoro cenderung berfluktuasi tetapi relatif stabil dalam kisaran ketimpangan sedang, sedangkan Tuban mengalami peningkatan ketimpangan secara lebih progresif dan signifikan dari tahun ke tahun. Pada periode akhir, Kabupaten Tuban memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibanding Bojonegoro, menandakan bahwa pemerataan kesejahteraan belum berjalan optimal. Grafik ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi semata-mata tidaklah memadai yang lebih krusial adalah memastikan bahwa hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan adil, bukan hanya oleh segelintir orang. Kondisi ketimpangan yang meningkat ini berpotensi memperlebar jarak antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah, sehingga memperbesar risiko kemiskinan, terutama bagi kelompok rentan. Individu dengan penghasilan rendah sering mengalami berbagai hambatan dalam mendapatkan akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja yang baik, sehingga menyulitkan mereka untuk lepas dari belenggu kemiskinan. Ketika ketimpangan semakin lebar, kelompok miskin menjadi menjadi lebih rentan terhadap berbagai

guncangan ekonomi, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok maupun perlambatan ekonomi.



Gambar 1. 12 Indeks Pembangunan Manusia Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Probolinggo, 2012-2021 (Data Diolah)

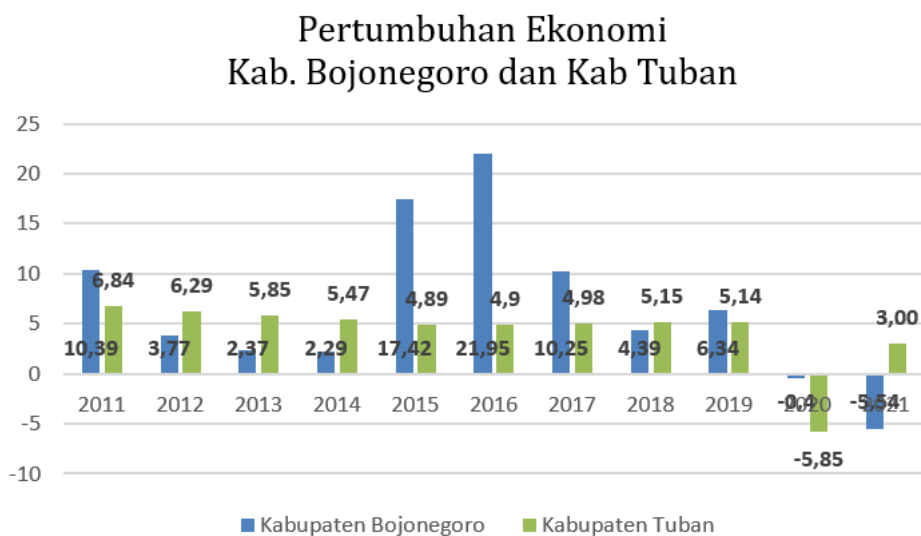
Grafik menunjukkan sebuah arah positif dan konsisten dalam peningkatan kualitas hidup di kedua kabupaten tersebut selama periode 2012 - 2021, yang tercermin dari naiknya nilai IPM. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa rata-rata masyarakat di Bojonegoro dan Tuban semakin membaik dalam segi kesehatan, pendidikan, serta standar hidup layak. Kabupaten Bojonegoro memulai di angka 64,2 pada 2012 dan berhasil mencapai 69,59 pada 2021. Kabupaten Tuban juga mengikuti pola serupa, naik dari 63,36 menjadi 68,91. Peningkatan yang stabil ini menyiratkan adanya keberlanjutan program pembangunan daerah yang berdampak nyata pada kesejahteraan warganya. IPM kedua daerah ini masih berada dalam klasifikasi sedang atau tinggi, namun belum mencapai klasifikasi sangat tinggi, menunjukkan masih ada kesempatan dan potensi besar untuk terus meningkat.

Perbandingan antara Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban menampilkan sebuah dinamika persaingan positif yang sangat ketat. Pada awal

periode 2012-2015, Tuban tampak sedikit unggul dengan nilai IPM yang selalu lebih tinggi daripada Bojonegoro. Keunggulan Tuban pada masa itu bisa diartikan bahwa Tuban mungkin memiliki fondasi awal yang sedikit lebih kuat, misalnya dalam aspek layanan kesehatan atau fasilitas pendidikan dasarnya. Namun, situasi mulai berbalik sekitar pertengahan hingga akhir periode. Mulai dari tahun 2016 dan seterusnya, Bojonegoro menunjukkan lonjakan perkembangan yang lebih agresif, sering kali menyusul dan kemudian melampaui nilai IPM Tuban, terutama terlihat jelas sejak tahun 2019 hingga 2021. Pada tahun 2021, IPM Bojonegoro 69,49 sedikit lebih tinggi dari Tuban 69,31. Ini bisa mengindikasikan adanya efektivitas kebijakan pembangunan yang lebih signifikan atau investasi besar di sektor-sektor kunci seperti pendidikan atau infrastruktur kesehatan di Bojonegoro dalam beberapa tahun terakhir, yang membuatnya berhasil mengakselerasi peningkatan IPM hingga melampaui Tuban.

IPM merupakan cerminan dari harapan dan kerja keras jutaan individu. Kenaikan 6 hingga 7 persen dalam satu dekade bukanlah sekadar angka statistik, melainkan hasil dari ribuan anak yang mendapat akses pendidikan lebih baik, puluhan ribu warga yang hidup lebih sehat dan panjang umur, dan peningkatan daya beli yang memungkinkan keluarga memenuhi kebutuhan dasar. Kenyataan di lapangan mungkin jauh lebih kompleks, di mana IPM yang hampir sama tinggi ditahun 2021, bisa menutup ketimpangan wilayah, misalnya antara wilayah perkotaan dan perdesaan di masing-masing Kabupaten. Namun, secara keseluruhan, data ini memberikan hasil optimis bahwa pembangunan manusia di Jawa Timur bagian ini berada di jalur yang benar. Kesenjangan yang sangat tipis pada tahun 2021 menunjukkan bahwa kedua pemerintah daerah terus berpacu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, menjadikan ini sebuah

kompetisi sehat yang pada akhirnya menguntungkan seluruh masyarakat Bojonegoro dan Tuban.



Gambar 1. 13 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Probolinggo, 2012-2021 (Data Diolah)

Grafik ini menggambarkan perekonomian yang sangat berbeda, didominasi oleh dinamika di satu pihak dan stabilitas yang lebih terjaga di pihak lain. Kabupaten Bojonegoro menampilkan pola pertumbuhan yang sangat tidak stabil. Puncaknya terdapat saat 2015 dan 2016, pertumbuhan Bojonegoro melonjak hingga mencapai angka yang fantastis, yaitu 17,42% dan bahkan 21,95%. Angka pertumbuhan sebesar ini dalam konteks ekonomi daerah biasanya hanya bisa dicapai jika ada proyek investasi berskala raksasa yang baru berjalan atau berproduksi penuh, seperti proyek di sektor migas atau industri ekstraktif lainnya. Lonjakan ini meski tampak luar biasa menyebabkan pertumbuhan Bojonegoro terasa seperti rollercoaster, karena setelah mencapai puncaknya di 2016, pertumbuhannya langsung meresot tajam pada tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, Tuban menunjukkan pola pertumbuhan yang jauh lebih terkendali dan moderat, bergerak di rentang 2% hingga 6% di sebagian besar tahun, mencerminkan fondasi

ekonomi yang mungkin lebih diversifikasi dan kurang bergantung pada satu sektor penyumbang besar.

Perbandingan antar kabupaten menunjukkan sebuah kesenjangan dalam sifat pertumbuhan ekonomi mereka. Ekonomi Bojonegoro, yang ditandai oleh lonjakan luar biasa dan kejatuhan yang tajam seperti kontraksi -5,85% pada 2020, dapat dikategorikan sebagai ekonomi yang berisiko tinggi, hasil tinggi (*high risk, high return*). kemungkinan kehadiran proyek-proyek besar besar seperti proyek minyak dan gas yang mencapai puncak produksi memberikan "*jackpot*". Ekonomi sementara yang sangat besar, tetapi begitu proyek memasuki fase penurunan atau investasi awal selesai, dampaknya langsung memukul angka pertumbuhan secara drastis, terbukti pada tahun 2020. Sebaliknya, Tuban mempertahankan pertumbuhan yang relatif stabil dan positif selama hampir seluruh periode, bahkan pada tahun 2020 saat pandemi melanda, Tuban hanya mengalami kontraksi ringan -0,40%, sementara Bojonegoro terperosok jauh. Ini menyiratkan bahwa daya tahan atau resiliensi ekonomi Tuban terhadap guncangan eksternal (seperti pandemi) lebih baik, karena mungkin ditopang oleh sektor-sektor non-ekstraktif yang lebih luas dan merata, seperti pertanian, perdagangan, atau industri manufaktur ringan.

Perekonomian yang ekstrem di Bojonegoro ini memiliki implikasi ganda bagi masyarakat. Di satu sisi, masa ledakan di tahun 2015 – 2016 mungkin menghasilkan lapangan kerja sementara yang melimpah dan meningkatkan pendapatan per kapita secara drastis, menciptakan euforia ekonomi dan peningkatan fasilitas. Di sisi lain, kejatuhan yang drastis dapat menimbulkan masalah sosial dan ekonomi yang serius, seperti putus hubungan kerja (PHK) ketika proyek migas selesai, atau munculnya pengangguran struktural karena tenaga kerja yang terlatih di sektor migas sulit terserap di sektor lain, menghasilkan ketidakpastian masa depan bagi warga.

Sementara itu, pertumbuhan Tuban yang lebih stabil, meskipun tidak pernah mencapai angka fantastis Bojonegoro, menawarkan kepastian dan stabilitas lapangan kerja yang lebih baik dari tahun ke tahun. Bagi sebagian besar warga, pertumbuhan yang stabil dan prediktif (Kabupaten Tuban) sering kali dirasakan lebih baik daripada ledakan sesaat diikuti keterpurukan (Kabupaten Bojonegoro). Tantangan terbesar Bojonegoro di masa depan adalah menggunakan keuntungan besar yang datang secara tiba-tiba dan tidak diharapkan dari periode ledakan tersebut untuk melakukan diversifikasi ekonomi agar tidak lagi terlalu bergantung pada sektor tunggal, sehingga memiliki daya tahan yang setara atau bahkan melebihi Tuban.

Adanya inkonsistensi antara tujuan pembangunan daerah dengan realitas yang terjadi. Secara makro, Pemerintah berupaya menurunkan tingkat kemiskinan dengan menggunakan proses percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, serta peningkatan pembangunan manusia. Namun, terjadi fenomena yang dikenal sebagai "pertumbuhan tanpa pemerataan" (*non-inclusive growth*). Jika pertumbuhan ekonomi telah terjadi, namun ketimpangan juga meningkat, maka hal ini menciptakan ketegangan antar individu dan kelompok bahkan mempengaruhi ketetapan politik (Purbandono, 2024). Ketimpangan ini secara statistik signifikan berkontribusi pada stagnasi atau peningkatan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Meskipun secara geografis berdekatan dan berada dalam satu kawasan kedua wilayah memiliki struktur ekonomi yang berbeda. Kabupaten Bojonegoro di dominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, sedangkan Kabupaten Tuban di dominasi oleh sektor industri pengolahan.

Penelitian ini didasarkan pada kondisi nyata yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Kabupaten Bojonegoro pernah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi akibat kontribusi sektor minyak dan gas bumi, namun tingkat kemiskinan masih tetap ditemukan terutama pada wilayah pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Sementara itu, Kabupaten Tuban mengalami peningkatan aktivitas industri dan pembangunan ekonomi, tetapi ketimpangan pendapatan cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hasil pembangunan belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Selain itu, IPM kedua kabupaten juga menunjukkan perkembangan yang berbeda, sehingga menarik untuk diteliti apakah peningkatan kualitas manusia benar-benar mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban?
3. Apakah tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban?
2. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban?
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban?

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini memakai metode penelitian kuantitatif dengan objek penelitian berada di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Penelitian ini mempunyai beberapa variabel utama yaitu tingkat ketimpangan pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai variabel bebas dan tingkat kemiskinan sebagai variabel terikat.

Dalam melaksanakan tugas akhir ini, ditetapkan beberapa batasan masalah yang hanya berfokus pada “Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban”, dengan batasan waktu antara tahun 2012 hingga 2021. Hasil studi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan gambaran yang komprehensif mengenai keterkaitan antara ketimpangan pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia, serta tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Data penelitian ini bersumber dari sumber resmi seperti Badan

Pusat Statistik, sehingga telah melalui proses verifikasi dan dinilai layak serta terpercaya untuk keperluan analisis statistik.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat temuan atau hasil studi ini diproyeksikan mampu memberikan pemahaman kepada pembaca secara konseptual dan memberikan wawasan mengenai tingkat kemiskinan di daerah serta unsur-unsur yang mempengaruhi tingkat kemiskinan tersebut. Hasil studi ini bisa dijadikan rujukan hingga bahan pengembangan untuk variabel yang telah diteliti oleh peneliti di masa depan.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diproyeksikan dapat memberikan saran dan mendukung pihak lain dalam langkah penelitian yang akan datang.

c. Manfaat Kebijakan

Temuan dari studi ini diharapkan dapat mendorong pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta Kabupaten Tuban untuk menangani persoalan kemiskinan di wilayah mereka.